



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Proses Bisnis Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah.

6. Peta Proses adalah keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan pendirian organisasi.
7. Peta Sub Proses adalah penjabaran lebih lanjut dari peta proses yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis.
8. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis.
9. Peta Lintas Fungsi adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

BAB II TUJUAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 3

Tujuan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 adalah:

- a. untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. agar mudah mengkomunikasikan mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. sebagai aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

BAB III PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 4

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah.

Pasal 5

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 meliputi:

- a. Peta Proses;
- b. Peta Sub Proses;
- c. Peta Relasi; dan
- d. Peta Lintas Fungsi.

Pasal 6

- (1) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disusun dengan mempedomani Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap perangkat daerah dan unit kerja menyusun Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap perangkat daerah dan unit kerja menyusun Standar Operasional Prosedur berdasarkan Peta Lintas Fungsi, Kegiatan, Sub Kegiatan, Aktivitas dan Layanan sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Peta Lintas Fungsi dan Standar Operasional Prosedur disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2022

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

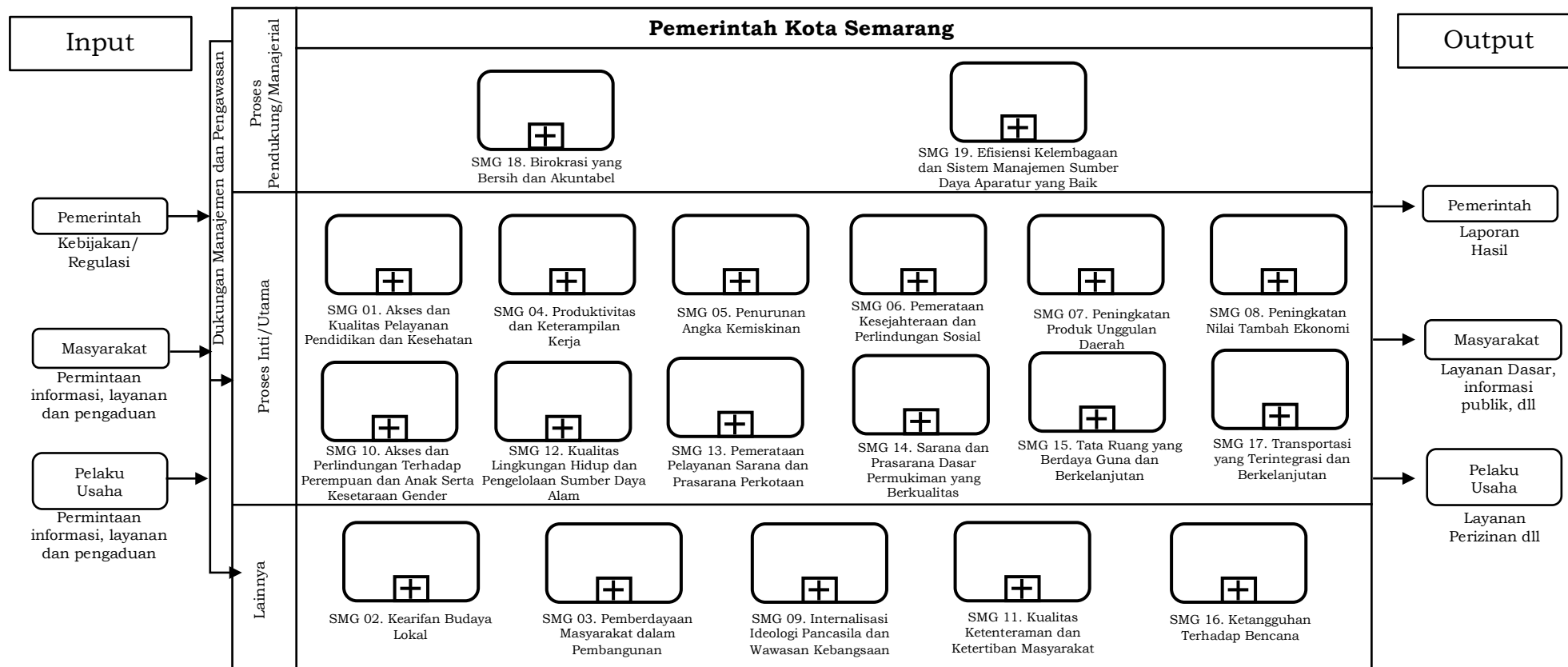


Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

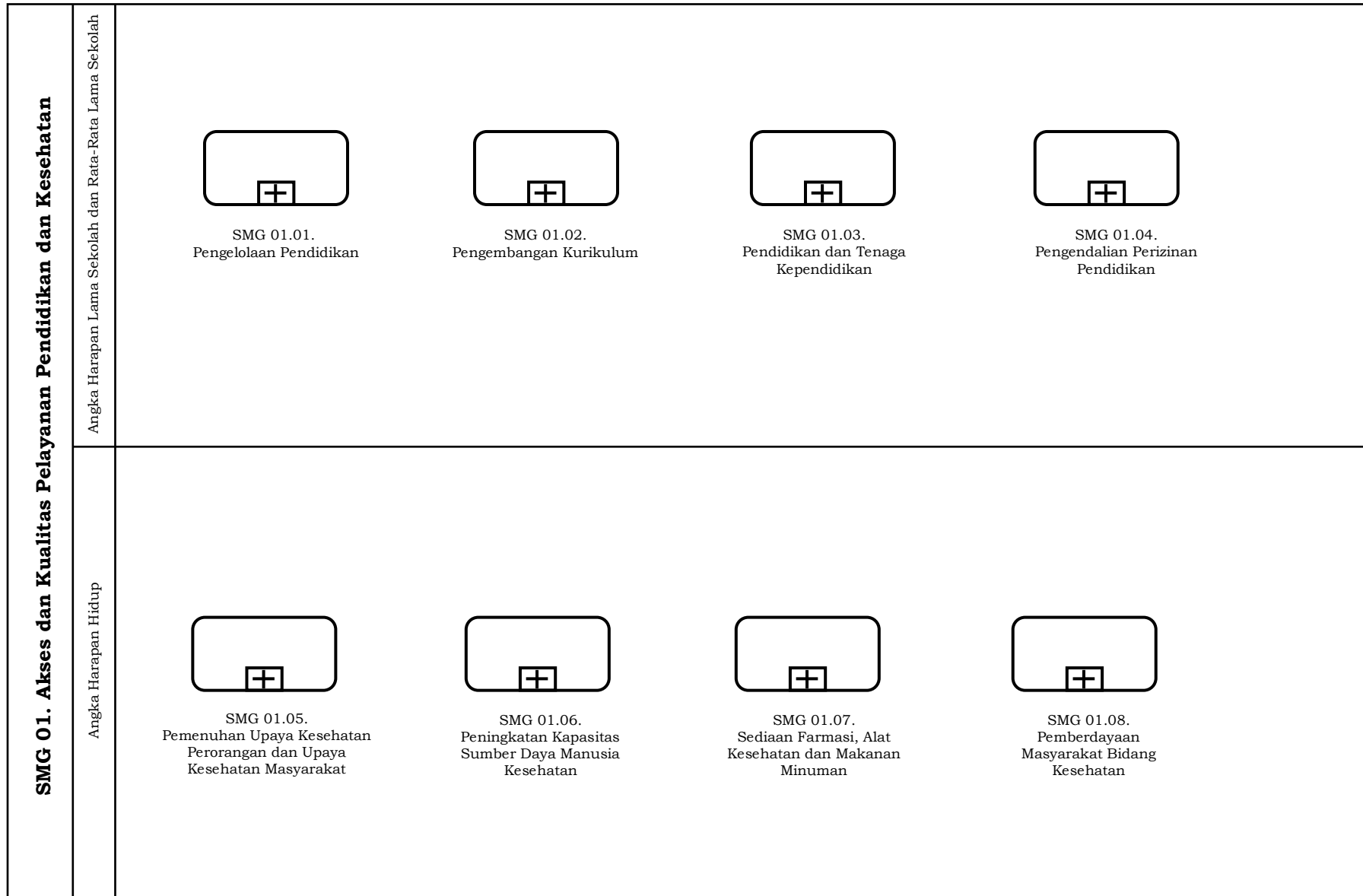
LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2021-2026

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026

A. PETA PROSES

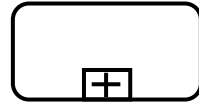


B. PETA SUB PROSES

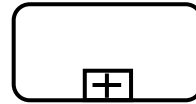


SMG 02. Kearifan Budaya Lokal

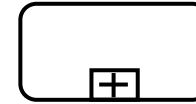
Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal



SMG 02.01.
Pengembangan
Kebudayaan



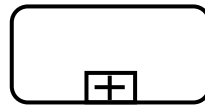
SMG 02.02.
Pengembangan Kesenian
Tradisional



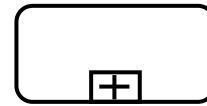
SMG 02.03.
Pelestarian dan
Pengelolaan Cagar Budaya

SMG 03. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat



SMG 03.01.
Administrasi Pemerintahan
Desa/ Kelurahan

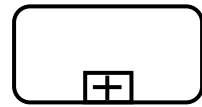


SMG 03.02.
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Lembaga
Adat dan Masyarakat

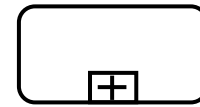
SMG 04. Produktivitas dan Keterampilan Kerja

Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi

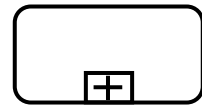
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



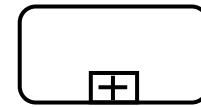
SMG 04.03.
Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga
Kerja



SMG 04.04.
Hubungan Industrial



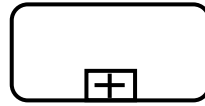
SMG 04.01.
Perencanaan Tenaga Kerja



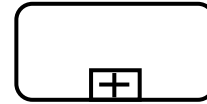
SMG 04.02.
Penempatan Tenaga Kerja

SMG 05. Penurunan Angka Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin



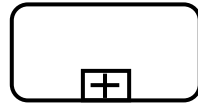
SMG 05.01.
Perlindungan dan Jaminan
Sosial



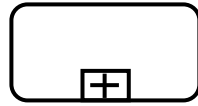
SMG 05.02.
Rehabilitasi Sosial

SMG 06. Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial

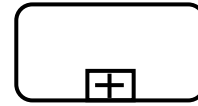
Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)



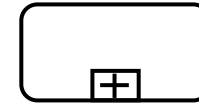
SMG 06.01.
Pemberdayaan Sosial



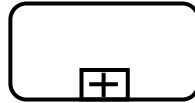
SMG 06.02.
Penanganan Warga
Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan



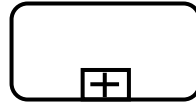
SMG 06.03.
Penanganan Bencana



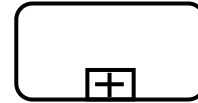
SMG 06.04.
Pengendalian Penduduk



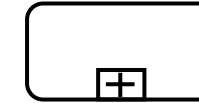
SMG 06.05.
Pembinaan Keluarga
Berencana



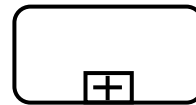
SMG 06.06.
Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga
Sejahtera



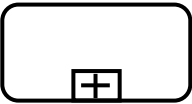
SMG 06.07.
Pengembangan Kapasitas
Daya Saing Kepemudaan



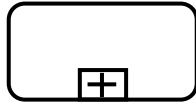
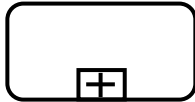
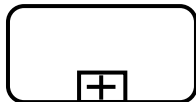
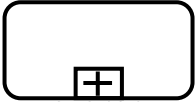
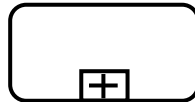
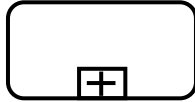
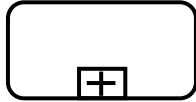
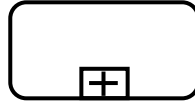
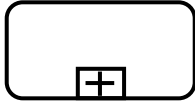
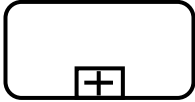
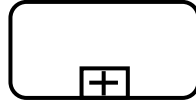
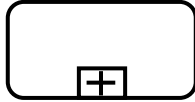
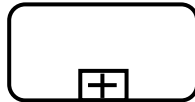
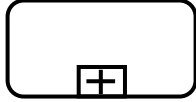
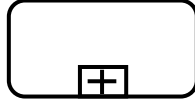
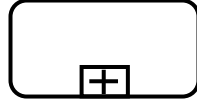
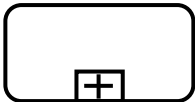
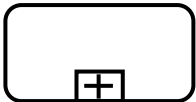
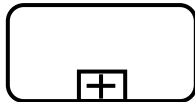
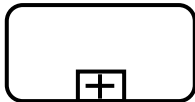
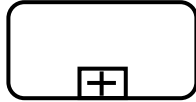
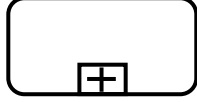
SMG 06.08.
Pengembangan Kapasitas
Daya Saing Keolahragaan



SMG 06.09.
Pengembangan Kapasitas
Kepramukaan

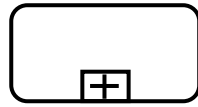
SMG 07. Peningkatan Produk Unggulan Daerah	Nilai Ekspor	 SMG 07.01. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian	 SMG 07.02. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	 SMG 07.03. Penanganan Kerawanan Pangan	 SMG 07.04. Pengawasan Keamanan Pangan		
	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	 SMG 07.05. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	 SMG 07.06. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	 SMG 07.07. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi	 SMG 07.08. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	 SMG 07.09. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	 SMG 07.10. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
		 SMG 07.12. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	 SMG 07.13. Pemasaran Pariwisata	 SMG 07.14. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			

SMG 08. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

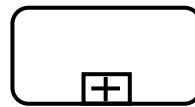
<p>Persentase Peningkatan Nilai Investasi</p>	 SMG 08.01. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	 SMG 08.02. Promosi Penanaman Modal	 SMG 08.03. Pelayanan Penanaman Modal	 SMG 08.04. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	 SMG 08.05. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
<p>PDRB Perkapita ADHB</p>	 SMG 08.06. Pengelolaan Perikanan Tangkap	 SMG 08.07. Pengelolaan Perikanan Budidaya	 SMG 08.08. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	 SMG 08.09. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	 SMG 08.10. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
<p>Kontribusi Kategori yang terkait Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB</p>	 SMG 08.11. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	 SMG 08.12. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	 SMG 08.13. Penyuluhan Pertanian	 SMG 08.14. Perencanaan dan Pembangunan Industri	 SMG 08.15. Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota
	 SMG 08.16. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	 SMG 08.17. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	 SMG 08.18. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	 SMG 08.19. Pengembangan Ekspor	 SMG 08.20. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	 SMG 08.21. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	 SMG 08.22. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			

SMG 09. Internalisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

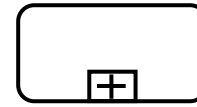
Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan



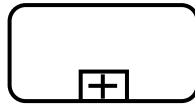
SMG 09.01.
Penguatan Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan



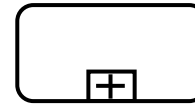
SMG 09.02.
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya Politik



SMG 09.03.
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan



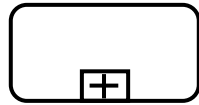
SMG 09.04.
Pembinaan dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya



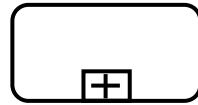
SMG 09.05.
Peningkatan Kewaspadaan
Nasional dan Peningkatan
Kualitas

SMG 10. Akses dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender

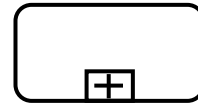
Indeks Pemberdayaan Gender



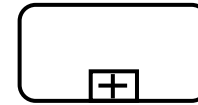
SMG 10.01
Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan
Perempuan



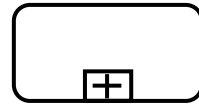
SMG 10.02.
Pengelolaan Sistem Data
Gender dan Anak



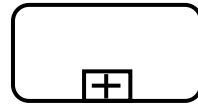
SMG 10.03.
Perlindungan Perempuan



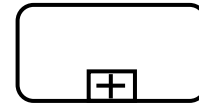
SMG 10.04.
Peningkatan Kualitas
Keluarga



SMG 10.05.
Pemenuhan Hak Anak



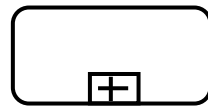
SMG 10.06.
Perlindungan Khusus
Anak



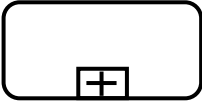
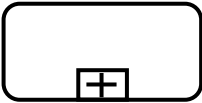
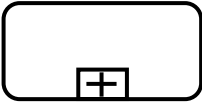
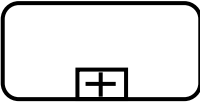
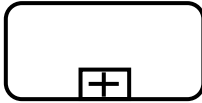
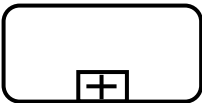
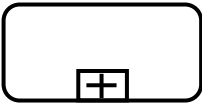
SMG 10.07.
Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

SMG 11. Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Angka Kriminalitas

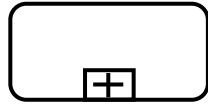


SMG 11.01.
Peningkatan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum

SMG 12. Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	
Indeks Kualitas Air	 <p>SMG 12.01. Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p>
Indeks Kualitas Udara	 <p>SMG 12.02. Pengendalian Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Limbah Berbahaya Lainnya</p>
Penurunan Emisi CO2	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>SMG 12.03. Perencanaan Lingkungan Hidup</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>SMG 12.04. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>SMG 12.05. Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</p> </div> </div>
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	 <p>SMG 12.06. Pengelolaan Persampahan</p>
Persentase Ruang Terbuka Hijau	 <p>SMG 12.07. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</p>

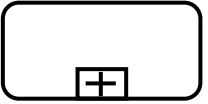
SMG 13. Pemerataan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Persentase Kawasan Banjir dan Rob



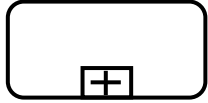
SMG 13.03.
Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Drainase

Persentase Perencanaan Regional dan Kota yang Terintegrasi



SMG 13.02.
Penyelenggaraan Jalan

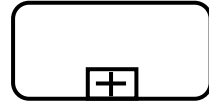
Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air secara Terpadu



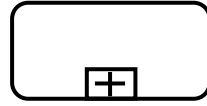
SMG 13.01.
Pengelolaan Sumber Daya Air

SMG 14. Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman yang Berkualitas

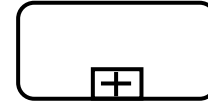
Persentase Rumah Layak Huni



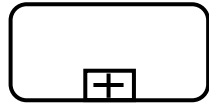
SMG 14.01.
Pengelolaan Kawasan
Permukiman



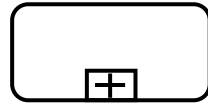
SMG 14.02.
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah



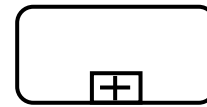
SMG 14.03.
Pengelolaan Sumber Daya
Air



SMG 14.04.
Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM)



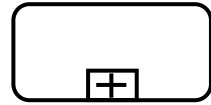
SMG 14.05.
Peningkatan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum
(PSU)



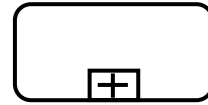
SMG 14.06.
Pengembangan Perumahan

SMG 15. Tata Ruang yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan

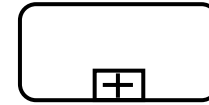
Persentase Tata Ruang yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan



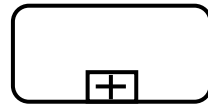
SMG 15.01.
Penyelenggaraan Penataan
Ruang



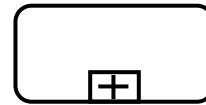
SMG 15.02.
Penataan Bangunan
Gedung



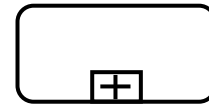
SMG 15.03.
Penataan Bangunan dan
Lingkungannya



SMG 15.04.
Penyelesaian Sengketa
Tanah Garapan



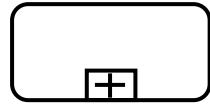
SMG 15.05.
Redistribusi Tanah serta
Ganti Kerugian Program
Tanah



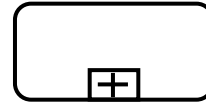
SMG 15.06.
Pengelolaan Izin Membuka
Tanah

SMG 16. Ketangguhan Terhadap Bencana

Indeks Resiko Bencana



SMG 16.01.
Penanggulangan Bencana

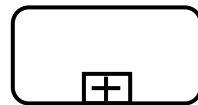


SMG 16.02.
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran

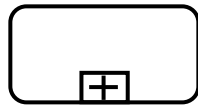
SMG 17. Transportasi yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Pengurangan Jumlah Titik/Ruas Rawan Macet

Rasio Konektivitas Kab/Kota



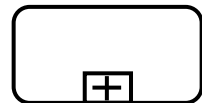
SMG 17.02.
Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan



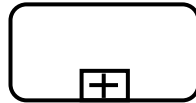
SMG 17.01.
Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan

SMG 18. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

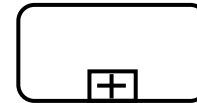
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



SMG 18.01.
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kab/Kota

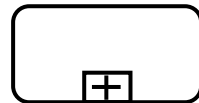


SMG 18.02.
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

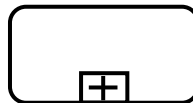


SMG 18.03.
Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

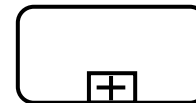
Opini Badan Pemeriksa Keuangan



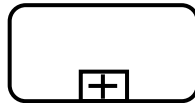
SMG 18.04.
Penyelenggaraan
Pengawasan



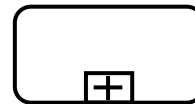
SMG 18.05.
Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi



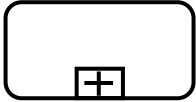
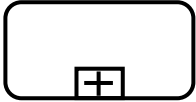
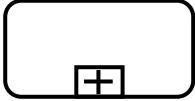
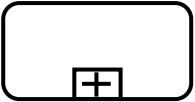
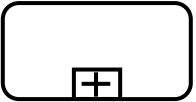
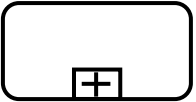
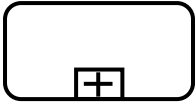
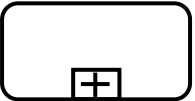
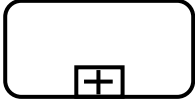
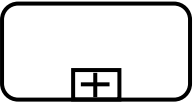
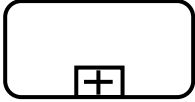
SMG 18.06.
Pengelolaan Keuangan
Daerah



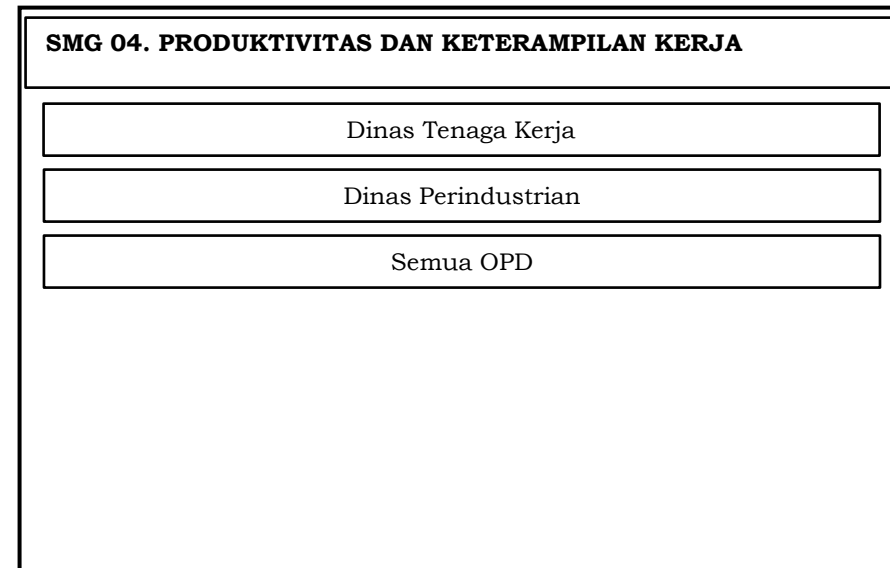
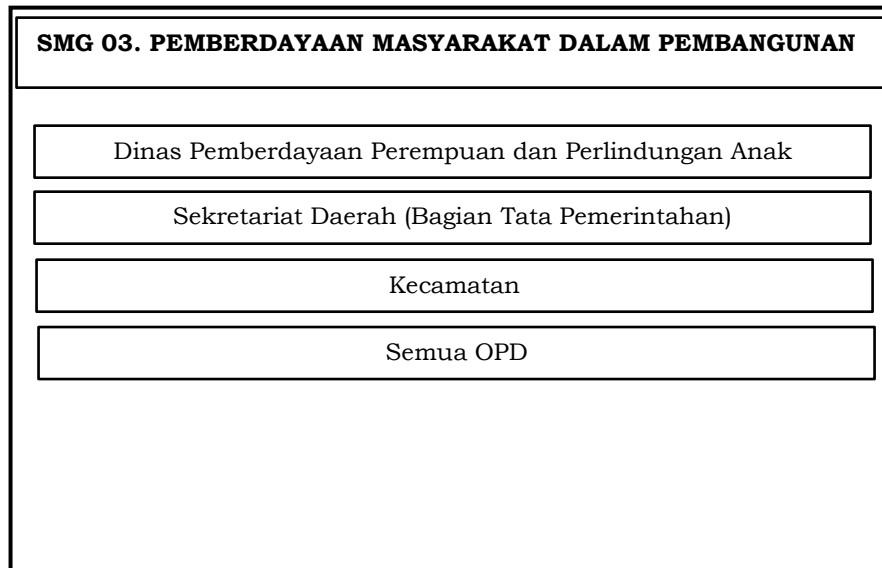
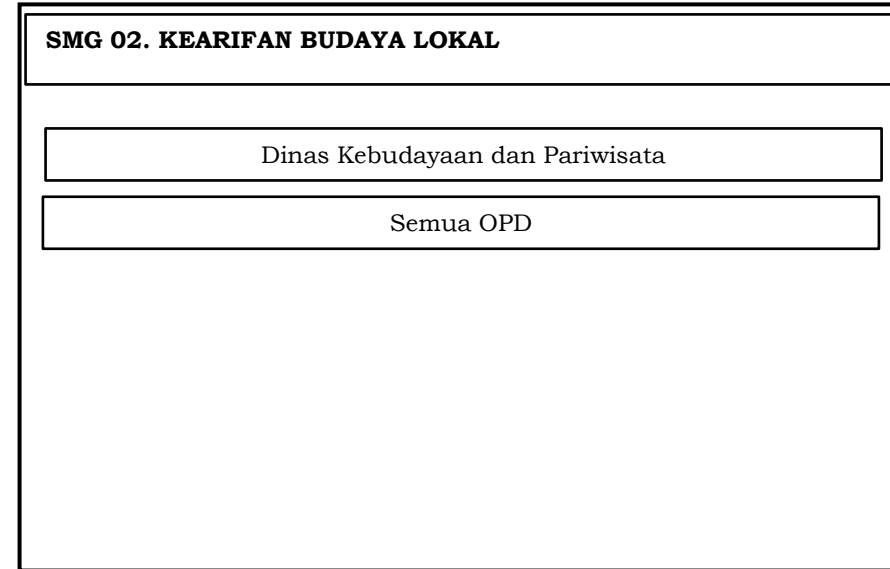
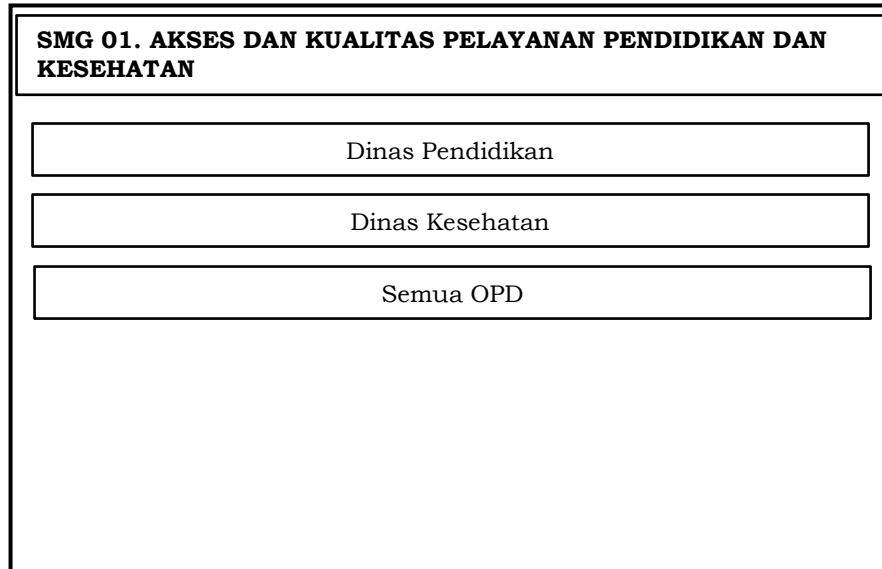
SMG 18.07.
Pengelolaan Barang Milik
Daerah



SMG 18.08.
Pengelolaan Pendapatan

SMG 19. Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur yang Baik	Indeks Profesionalitas ASN	 SMG 19.01. Pengelolaan Kepegawaian Daerah	 SMG 19.02. Pengembangan Sumber Daya Manusia	 SMG 19.03. Penelitian dan Pengembangan	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	 SMG 19.04. Informasi dan Komunikasi Publik	 SMG 19.05. Pengembangan Aplikasi Informatika	 SMG 19.06. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	 SMG 19.07. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	 SMG 19.08. Penyelenggaraan Urusan Penunjang	 SMG 19.09. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	 SMG 19.10. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	 SMG 19.11. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		

C. PETA RELASI



SMG 05. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Dinas Sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Semua OPD

SMG 06. PEMERATAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Dinas Sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pemadam Kebakaran

Kecamatan

Semua OPD

SMG 07. PENINGKATAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Ketahanan Pangan

Kecamatan

Semua OPD

SMG 08. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI

Dinas Penanaman Modal dan PTS

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Perikanan

Dinas Pertanian

Dinas Perindustrian

Dinas Perdagangan

Semua OPD

SMG 09. INTERNALISASI IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sekretariat Daerah

Kecamatan

Semua OPD

SMG 10. AKSES DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA KESETARAAN GENDER

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Kecamatan

Semua OPD

SMG 11. KUALITAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Perhubungan

Kecamatan

Semua OPD

SMG 12. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Dinas Lingkungan Hidup

Semua OPD

SMG 13. PEMERATAAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN

Dinas Pekerjaan Umum

Semua OPD

SMG 14. SARANA DAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN YANG BERKUALITAS

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Semua OPD

SMG 15. TATA RUANG YANG BERDAYA GUNA DAN BERKELANJUTAN

Dinas Penataan Ruang

Semua OPD

SMG 16. KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran

Semua OPD

SMG 17. TRANSPORTASI YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

Dinas Perhubungan

Semua OPD

SMG 18. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

Sekretariat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Semua OPD

SMG 19. EFISIENSI KELEMBAGAAN DAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR YANG BAIK

Sekretariat Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Semua OPD

D. PETA LINTAS FUNGSI

Peta Lintas Fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/ fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Berikut merupakan tahapan untuk membuat Peta Lintas Fungsi:

1. gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat mempresentasikan *roles/peran*;

2. tuliskan nama-nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

Kementerian /Lembaga	
Pemerintah Provinsi	
OPD Kota Semarang	

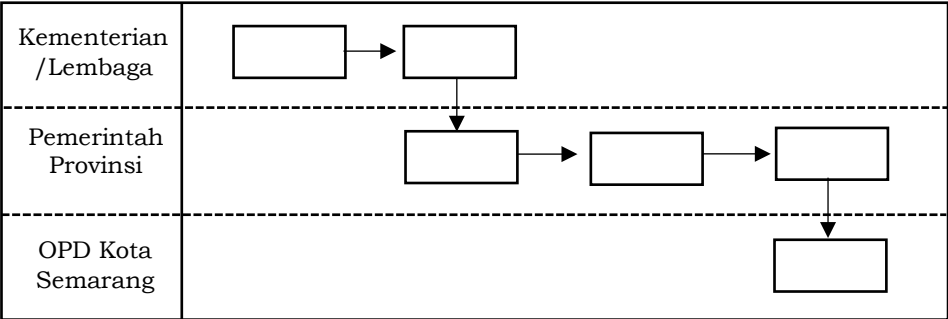
3. identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/ aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada Peta Relasi;

Kementerian /Lembaga	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pemerintah Provinsi	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OPD Kota Semarang	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satuan kerja terkait;

Kementerian /Lembaga	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Pemerintah Provinsi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OPD Kota Semarang	<input type="text"/>		

5. beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta.



WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196503111986021004